

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

KBRI telah menginisiasi berbagai program, termasuk program kelas belajar informal di beberapa lokasi, yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Kelas ini memungkinkan anak-anak yang putus sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka, meskipun secara non-formal. KBRI juga berperan aktif dalam koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Malaysia, untuk memastikan hak-hak pendidikan anak PMI terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan Konstitusi Indonesia

Kendala utama yang dihadapi oleh KBRI dalam memenuhi hak pendidikan anak PMI di Malaysia meliputi ketiadaan dokumen legal seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan paspor, yang dibutuhkan untuk mendaftar di sekolah. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai menjadi hambatan tambahan bagi akses pendidikan yang layak bagi anak-anak ini. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KBRI dan pemerintah Indonesia perlu mengintensifkan kerjasama bilateral dengan pemerintah Malaysia dan berbagai pihak terkait

#### **B. SARAN**

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak imigran. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

1. **Pengurusan Dokumen Legal:** Membantu proses pengurusan dokumen legal bagi anak-anak imigran agar mereka dapat mendaftar di sekolah-sekolah resmi.
2. **Pemberian Subsidi Pendidikan:** Memberikan subsidi atau beasiswa pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga imigran yang kurang mampu.
3. **Peningkatan Infrastruktur Transportasi:** Memperbaiki dan memperluas infrastruktur transportasi di daerah terpencil untuk memudahkan akses ke fasilitas pendidikan.
4. **Pembelajaran Jarak Jauh:** Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh atau membentuk unit pendidikan sementara yang dapat menjangkau anak-anak di daerah terpencil.
5. **Kerjasama Multilateral:** Mendorong kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional guna memastikan hak-hak pendidikan anak-anak imigran terpenuhi sesuai standar internasional.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak imigran di Malaysia dapat menikmati hak pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang serta mencapai potensi mereka sepenuhnya.